

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang sanksi ekonomi Amerika Serikat dan sekutu atas tindakan operasi militer khusus Rusia terhadap Ukraina pada 24 Februari 2022. Namun, sekumpulan sanksi ekonomi tidak menghentikan upaya operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Konsep sanksi ekonomi digunakan dalam menjelaskan permasalahan dalam fenomena ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif eksplansi. Selanjutnya, dijelaskan mengenai tujuan dan hipotesis penelitian serta diakhiri dengan penjelasan terkait sistematika penulisan.

### **A. Latar Belakang**

Hubungan Rusia dan Ukraina pada awalnya sungguh dekat dimana keduanya dahulu bersatu dalam Federasi Uni Soviet atau USSR (*Union Soviet of Socialist Republic*). Runtunnya Uni Soviet bermekar menjadi beberapa negara baru merdeka seperti, Rusia, Ukraina, Belarus, dan negara-negara yang tergabung dalam kawasan Baltik dan Asia Tengah membawa hubungan Rusia dan Ukraina menjadi tidak harmonis berisiko menimbulkan konflik/perang satu sama lain, padahal hubungan kedua negara sebelumnya begitu baik dan harmonis. Kedekatan hubungan mereka ditunjukkan melalui bantuan-bantuan dalam bidang ekonomi yang diberikan Rusia kepada Ukraina (Conant, 2023).

Dinamika hubungan Rusia dan Ukraina bergulir bersamaan dengan kepemimpinan Vladimir Putin sebagai presiden Federasi Rusia. Putin memiliki ambisi dalam membangkitkan kejayaan Rusia serupa pada saat kejayaan Uni Soviet. Kehadiran NATO di kawasan Eropa Timur dengan fasilitas militer berupa rudal dan tawaran Ukraina bergabung NATO mengancam keamanan Rusia. Hal ini menjadi kekhawatiran bagi Rusia jika Ukraina berada dalam pengaruh Eropa sepenuhnya.

Oleh karena itu, Vladimir Putin merasa geram dan bereaksi dengan melakukan pencaplokan Krimea dan memerintahkan tindakan operasi militer khusus ke Ukraina pada 24 Februari 2022 (Farid et al., 2022).

Aneksasi Rusia atas Krimea tahun 2014 merupakan konflik awal Rusia dan Ukraina. Salah satu peristiwa penyebab konflik Rusia-Ukraina, yaitu pemberlakuan referendum 17 Maret 2013 yang mendorong Rusia menganeksasi Krimea tahun 2014. Pembatalan kerjasama Ukraina dan Uni Eropa oleh Presiden Viktor Yanukovych mengundang kemarahan rakyat Ukraina yang berujung pada pemecatan Yanukovych sebagai presiden yang mana ternyata Presiden Yanukovych adalah tokoh politik Ukraina yang mendukung Rusia (Fachri, 2015). Di bagian selatan Ukraina timbul demonstrasi pemisahan diri Krimea dari Ukraina melalui sebuah referendum. Sejumlah 96,7% hasil referendum menyatakan menyetujui pemisahan Krimea dari Ukraina dan hasil referendum tersebut menjadi alasan Rusia menjaga kedaulatan Krimea. Setelah 8 tahun berlalu aneksasi Rusia atas Krimea, Rusia kembali menyerang Ukraina yang disebut Rusia sebagai tindakan operasi militer khusus pada 24 Februari 2022 (Anggara, 2018).

Operasi militer khusus Rusia yang selanjutnya disebut OMK merupakan sebuah serangan penyelamatan Rusia atas tindakan penganiayaan yang dilakukan Ukraina terhadap separatis pendukung Rusia di wilayah Donbas (Tongueincheek, 2023). Presiden Vladimir Putin dalam pidatonya mengungkapkan bahwa dia melakukan operasi militer untuk memerangai rezim Ukraina yang mengintimidasi warga sipil di Ukraina Timur (Osborn & Nikolskaya, 2022). Peristiwa ini pun sangat mengejutkan bagi dunia internasional. Selain itu, OMK Rusia juga dipengaruhi oleh rezim Zelensky yang mendorong Ukraina bergabungnya ke dalam NATO. NATO terus menerus meningkatkan kehadiran militernya di wilayah perbatasan Timurnya dan memicu Rusia melakukan tindakan militer di Ukraina. Sejak akhir Februari 2022

dimulainya OMK hingga saat ini telah terjadi krisis energi, krisis kemanusiaan, inflasi sampai terganggunya transaksi perdagangan internasional. Tercatat dampak operasi militer khusus Rusia ke Ukraina memakan banyak korban dengan rincian kematian 43 ribu jiwa, luka-luka 13 ribu, hilang dan mengungsi 15 juta jiwa serta kerusakan properti yang parah ( Balmforth & Djurica, 2022).

Operasi militer khusus Rusia terhadap Ukraina memunculkan pihak-pihak menuntut dan mengecam tindakan Rusia. Berbeda dengan Rusia yang menyebut serangan sebagai operasi militer khusus, Amerika Serikat dan sekutu menyebut serangan Rusia sebagai invasi terhadap Ukraina. Tindakan Rusia dianggap sebagai bentuk pelanggaran atas hukum internasional dan negara berdaulat. Invasi sendiri merupakan bentuk pengerahan pasukan ke negara lain guna menguasai teritori negara tersebut (Cambridge Dictionary, 2023). Amerika dan sekutu mengatakan tindakan Putin tidak dapat dibenarkan dan tidak beralasan dan berpotensi mengancam keamanan dunia (ALJAZEERA, 2022). Oleh karena itu, Serangan militer yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina direspon Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, Kanada, Singapura, dan Australia dengan memberikan sanksi ekonomi. Sanksi dikenakan dengan maksud agar Rusia berhenti mengirimkan pasukan militer dan serangan ke wilayah Ukraina (CNN Indonesia, 2022).

Presiden Amerika Serikat, Joe Biden mengeluarkan perintah Eksekutif 14024 pada 8 Maret 2022 sebagai tindakan untuk mensanksi Rusia. Amerika Serikat mengambil langkah pembatasan impor barang-barang seperti minyak, gas alam, batu bara, minuman alkohol, makanan laut, dan lainnya dari Federasi Rusia dan melarang ekspor maupun pengadaan investasi ekonomi ke Federasi Rusia (the white house, 2022). Departemen Keuangan Amerika Serikat resmi pada 24 Februari 2022 telah memberikan sanksi kepada dua bank besar milik Rusia VTB dan Sberbank. Kedua bank Rusia diputuskan dari jaringan keuangan Amerika Serikat. Tindakan ini

membatasi dan menghentikan kemampuan Rusia dalam mencari dana bagi pengembangan pertahanan dan militernya (Departement, 2022). Selain itu juga, Departemen Keuangan Amerika Serikat telah membekukan sejumlah asset oligarki Rusia yang terlibat dan mendukung kebijakan operasi militer khusus yang dilakukan Presiden Rusia Vladimir Putin terhadap Ukraina (Liptak, 2022).

Sama halnya seperti yang dilakukan Amerika Serikat, Josep Borell perwakilan Dewan Eropa mengungkapkan bahwa Uni Eropa telah mengadopsi peraturan pada 3 Juni 2022 terkait sanksi kepada Rusia atas tindakan operasi militer khusus-nya ke Ukraina dengan melarang impor minyak Rusia, ekspor barang-barang teknologi pertahanan dan menanggukkan sejumlah bank milik Rusia, hal ini menyebabkan kehilangan daya Rusia dalam mengembangkan militernya untuk agresinya ke Ukraina (Council & Union, 2022). Di sisi lain, Presiden komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen mengungkapkan Uni Eropa memberikan sanksi bagi Rusia atas operasi militer khusus terhadap Ukraina meliputi sanksi individu terhadap pejabat politik dan pertahanan asal Rusia meliputi Presiden Vladimir Putin dan Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov (DG Trade, 2022).

Bukan hanya Amerika Serikat dan Uni Eropa yang memberikan sanksi terhadap Rusia. Kanada pun telah mengamandemen dan mengadopsi undang-undang Tindakan Ekonomi Khusus terhadap Rusia. Kemudian, pada 8 April 2022 mengumumkan sejumlah sanksi kepada Rusia atas tindakan operasi militer khususnya kepada Ukraina berupa pemblokiran sejumlah bank dan entitas milik Rusia yang beroperasi di Kanada dan membatasi kegiatan impor dari Rusia. Hal ini membawa dampak bagi kurangnya kemampuan Rusia dalam membiayai perang melawan Ukraina (Canada, 2022).

Operasi Militer Khusus Rusia ditanggapi oleh Inggris dengan memberikan sanksi terhadap Rusia. Rishi Sunak mengungkapkan bahwa Inggris melarang

kegiatan perdagangan sejumlah barang ekspor Rusia yang mana keuntungannya berpotensi sebagai peningkatan biaya perang Rusia. Sejumlah barang ini terdiri dari minyak, tembaga, besi, aluminium, makanan dan minuman, produk residu, timah dan barang lainnya. Inggris juga mengenakan tarif sebesar 35% terhadap segala bentuk produk asal Rusia ( Trade, 2022).

Bukan hanya benua Barat, Singapura juga mengikuti langkah Barat dalam memberikan sanksi terhadap Rusia atas operasi militer khususnya ke Ukraina dan tindakan veto Rusia atas resolusi Dewan Keamanan PBB. Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan menyatakan Singapura memberikan sanksi pada sejumlah bank yang terhubung dengan Rusia. Singapura juga menanggukkan sejumlah ekspor bahan pembuat senjata yang digunakan sebagai senjata perakit dalam melakukan serangan terhadap Ukraina (Mandhana, 2022).

Perdana Menteri Australia Scott Marison telah mengumumkan menargetkan sanksi kepada badan keuangan Rusia yang berkontribusi dalam transaksi pembayaran kegiatan perdagangan energi, minyak, gas dan mineral. Larangan perjalanan juga dikenakan kepada tokoh-tokoh yang diduga membantu dan mempromosikan legitimasi serangan Rusia terhadap Ukraina. Australia juga mengancam akan mengusir duta besar Rusia untuk Australia melalui pernyataan Menteri Luar Negeri Australia Marisa Payne (Dziedzic, 2022).

Deretan sanksi dari negara-negara tersebut diarahkan untuk melemahkan entitas keuangan Rusia agar Rusia tidak bisa melakukan transaksi internasional dan berdampak buruk pada ekonomi negara. Selain itu, sanksi ekonomi diterapkan untuk melemahkan posisi ekonomi Rusia dalam aktivitas perdagangan internasional yang berkontribusi dalam pengembang pertahanan militer Rusia. Uni Eropa memberikan sanksi berupa pembekuan asset milik tokoh-tokoh elit Rusia yang disimpan di lembaga keuangan Eropa dan melakukan penahanan impor produk-produk dari Rusia

walaupun Uni Eropa dan Rusia adalah mitra perdagangan utama. Sanksi ekonomi ini diharapkan melemahkan ekonomi Rusia dan kemampuan dalam mengembangkan militernya. Uni Eropa juga sepakat untuk bergabung dengan Amerika Serikat dalam memblokir Rusia dari jaringan transaksi SWIFT (*Society For World-Wide Interbank Financial Telecommunications*) sehingga aktivitas transaksi perdagangan internasional Rusia terhambat. Pemutusan jaringan transaksi Rusia dari SWIFT (*Society For World-Wide Interbank Financial Telecommunications*) sebenarnya berdampak merugikan juga bagi Uni Eropa karena Jerman sebagai salah satu pengimpor gas utama dari Rusia melalui *Nord Stream Pipeline* kesusahan dalam melakukan transaksi (melander & Baczynska, 2022).

Namun, sekumpulan sanksi internasional yang dikenakan sejumlah negara terhadap Rusia tidak direspon sesuai yang dituntutkan kepada Putin. Rusia hingga saat ini terus terlihat mengirimkan pasukan militer dan belum menghentikan penyerangan di wilayah Ukraina. Terhitung tanggal 13 Juni 2022, Rusia menembakkan Rudal kaliber ke wilayah Ukraina timur dan barat. Tembakan Rudal tersebut mengenai Jet Tempur SU-25 dan sejumlah fasilitas militer Ukraina di wilayah Chokthif serta menewaskan 22 orang. Menurut kesaksian Olexender Senkevich, Rusia telah menembakkan Rudal dari arah Laut Hitam dan mengenai tiga kota di Ukraina Odessa, Mykolaiv, dan Kharkiv. Dari ketiga kota tersebut, Odessa adalah jalur khusus distribusi makanan dari sejumlah negara untuk Ukraina (Sorongan, 2022). Dikutip melalui detik.com per tanggal 1 November 2022 militer Rusia kembali meluncurkan Rudal ke wilayah ibu kota Kiev dan menghancurkan sejumlah infrastruktur energi Ukraina yang berdampak pada kerusakan dan pemutusan listrik dan air bersih bagi warga sipil Ukraina (news, 2022).

Selain serangan militer, Putin membalas tindakan pemberian sanksi internasional dengan menerapkan *counter sanction* terhadap beberapa negara yang memberikan

sanksi ekonomi pada Rusia seperti Uni Eropa. Pemerintah Rusia melalui Perdana Menteri Mikhail Mishustin mengumumkan sejumlah kebijakan larangan ekspor dan impor yang berhubungan dengan negara-negara pemberi sanksi. Rusia melarang impor 200 produk dalam negeri negara-negara barat dan memberhentikan ekspor minyak dan petrokimia ke barat. Selain itu, Rusia juga menyebutkan telah memberhentikan ekspor peralatan teknologi komunikasi, kesehatan, pertanian dan kayu (News, 2022).

Disamping itu juga, sanksi ekonomi yang diberikan barat dengan tujuan menghukum Rusia untuk menghentikan operasi militer khususnya di Ukraina tidak diimplementasikan oleh seluruh negara. Sejumlah negara yang memiliki hubungan baik dengan Rusia seperti China dan India tetap menjalin kerjasama dengan Rusia. Bukan hanya itu, Rusia memiliki ikatan dengan blok ekonomi negara berkembang yakni BRICS. Disamping OMK menuai sanksi bagi Rusia sebaliknya hubungan Rusia dengan BRICS justru meningkatkan. Kelompok ekonomi ini menjadi potensi Rusia mengalihkan pasarnya dalam mengurangi dampak sanksi ekonomi. Presiden Putin dalam pidatonya di KTT BRICS di China tahun 2022 mengungkapkan bahwa Rusia membuka dan mengalihkan pasar minyak dan gas-nya ke negara-negara BRICS (Dw, 2022).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis kemudian mengajukan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian kali ini yaitu:

1. Mengapa sanksi internasional tidak mengubah keputusan Rusia dalam menghentikan tindakan operasi militer khususnya ke Ukraina tahun 2022 ?
2. Bagaimana Strategi Rusia menghadapi Sanksi Ekonomi dari Amerika Serikat dan Sekutu atas operasi militer khusus Rusia ke Ukraina Tahun 2022?

## **C. Kerangka Berpikir**

### **Sanksi Ekonomi**

Kobayashi (2017) mendefinisikan sanksi ekonomi sebagai sebuah upaya yang dilakukan oleh suatu negara untuk memaksa negara lain untuk segera merubah kebijakannya dengan cara membatasi hubungan ekonomi mereka. Sanksi ekonomi telah populer sekitar tahun 1970-an sebagai instrumen politik dalam menggantikan intervensi militer yang mengarahkan pada kerugian ekonomi, politik, dan, manusia. Kepopuleran sanksi ekonomi ditunjukkan dalam kasus yang ada sejak tahun 1945-1975 berjumlah 317 sanksi yang semakin meningkat yang diberikan kepada 164 negara dan kedepannya akan terus populer dan digunakan sebagai metode untuk menghukum negara yang melanggar perdamaian dan hukum internasional Morgan, Bapat, & Kobayashi, 2014 dalam (Kobayashi, 2017).

Namun, keprihatinan sejumlah ilmuwan muncul akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh sanksi ekonomi. Dibalik kepopuleran sanksi ternyata membawa dampak krisis pangan dan malnutrisi yang meningkatkan jumlah kematian walaupun dipandang efektif dan sangat rendah biaya daripada melakukan intervensi militer (Peksen, 2011; Allen & Lektzian, 2013) dalam (Kobayashi, 2017). Hal ini adalah bentuk kerugian ekonomi dari sanksi balasan yang diberikan negara target kepada



negara pemberi sanksi.

Dalam sanksi internasional menurut Kobayashi (2017, pp. 3–4) mengungkapkan ada beberapa aturan atau konsep dalam memahami sebuah sanksi. Pertama, sanksi melibatkan dua pihak, satu pihak sebagai pengirim dan yang lain sebagai target. Kedua, dalam sanksi hal yang dibatasi berupa hubungan ekonomi, perdagangan, bantuan luar negeri. Ketiga, sanksi harus membawa tuntutan dengan maksud mengubah kebijakan negara target. Sanksi ekonomi dimaksudkan sebagai alat politik internasional yang dikenakan kepada negara-negara yang dianggap melanggar perjanjian internasional atau bilateral dengan cara melemahkan kekuasaan politik dan mendorong kesadaran sosial sehingga memaksa negara target tunduk dan segera merubah kebijakannya.

Menurut jenisnya sanksi dapat dikategorikan dari jumlah pihak yang memberikan. Sanksi apabila diberikan oleh satu negara dikategorikan sebagai sanksi sepihak dan biasanya diberikan oleh negara yang memiliki power kuat. Selanjutnya, sanksi yang diberikan oleh sejumlah negara dapat dikategorikan kedalam sanksi multilateral yang biasanya dikenal melalui sanksi United Nation. Selain itu, kategori sanksi yang lain dapat dikategorikan sebagai sanksi perdagangan dan sanksi keuangan (Nasrudin, 2022). Dalam 20 tahun terakhir, dunia telah menyaksikan proliferasi sanksi. Dewan Keamanan PBB telah menjatuhkan sanksi di Angola (1993, 1997, dan 1998), Rwanda (1994), Sudan (1996), Sierra Leone (1997 dan 2000), Afghanistan (1999), Ethiopia dan Eritrea (2000), dan banyak lagi. baru-baru ini di Iran (2006) dan Korea Utara (2006–16) (Benzell, 2017).

### **Efektivitas Sanksi Ekonomi**

Sanksi ekonomi belakangan ini semakin sering digunakan sebagai alat politik dalam membatasi negara target bertindak atas hal yang tidak diinginkan atau melanggar perdamaian internasional. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya

tujuan suatu negara memberikan sanksi adalah kebanyakan untuk mempengaruhi kebijakan suatu negara dengan cara membatasi gerakan negara target dalam melakukan hubungan ekonomi dan perdagangan. Namun, keberhasilan sanksi-sanksi tersebut masih diragukan dapat menghentikan tindakan dan mengubah kebijakan negara target.

Beberapa penelitian meneliti efektivitas dari sanksi ekonomi. Hufbauer, Schott dan Elliott, (1990) dalam (Kobayashi, 2017, p. 2) dimana penelitiannya berjudul *Economic Sanctions reconsidered: History and Current Policy* berpendapat bahwa sanksi ekonomi hanya memiliki kapasitas yang sangat terbatas untuk memenuhi tujuan yang dimaksudkan. Kesepakatan di antara ilmuwan politik mengungkapkan bahwa sanksi jarang, jika pernah, berhasil, karena sanksi tersebut mencapai tujuan politik yang mereka nyatakan hanya dalam sekitar 30 persen kasus. Konsisten dengan ini, bukti empiris mendukung bahwa sebagian besar episode sanksi cukup pendek. Menurut TIES, 49% sanksi berakhir dalam satu tahun, dan 76% dalam tiga tahun (Kobayashi, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa sebuah sanksi kemungkinan memiliki kemampuan yang cukup mempengaruhi negara target namun hanya bersifat sementara dalam penerapannya.

Adler-Karlsson mengungkapkan sebuah embargo yang diberikan Amerika kepada Uni Soviet hanya memperlambat ekonomi Soviet setengah tahun tidak lebih (Wallenstein, 2000). Disamping itu dalam sebuah penelitian ditemukan bahwa hanya lima persen yang benar-benar berhasil dalam implementasinya (Pape1997) dalam (Wallenstein, 2000). Penelitian yang dilakukan Martens Memenuhi (2018) yang berjudul *can economic sanction be efective* menjelaskan bagaimana proses dan hambatan-hambatan yang dihadapi ketika sanksi digunakan sebagai instrumen politik yang diarahkan secara spesifik ke negara Rusia dan Iran. Temuan yang dihasilkan berupa sanksi terkadang menjadi tindakan yang lebih efektif digunakan dari pada

intervensi militer, namun dibalik itu penerapannya juga merugikan bagi negara pemberi sanksi itu sendiri.

Keraguan dalam keberhasilan sanksi ekonomi dalam menekan negara target sangat erat kaitannya dengan keadaan pasar dan dunia yang saling bergantung satu sama lain. Tumbuhnya saling ketergantungan pasar dan munculnya Global Value Chains (GVCs), meningkatnya peran perdagangan jasa, e-commerce dan peran Foreign Direct Investment (FDI) sebagai cara alternatif bagi negara target untuk memulihkan keadaannya. Negara target mungkin dengan mudah mengkompensasi kerugiannya dari sanksi dengan mencari sumber alternatif untuk bantuan asing atau dengan menemukan pasar dan mitra lain kepada siapa mereka mengarahkan pertukaran ekonomi mereka (Smeets, 2018). Pada kasus sanksi ekonomi yang dikenakan pada Rusia justru menjadi bomerang bagi Uni Eropa karena ketergantungan ekonomi yang erat diantara keduanya.

#### **D. Hipotesis**

Berdasarkan kerangka teori diatas, maka hipotesis yang bisa diambil untuk penelitian ini adalah: Mengapa sanksi internasional tidak mengubah keputusan Rusia dalam mengintervensi Ukraina:

Karena rendahnya ketergantungan Rusia terhadap negara-negara pemberi sanksi dan Rusia mencari alternatif kemitraan dengan negara-negara dalam kelompok ekonomi BRICS.

- a. Rusia meningkatkan kerjasama ekonomi melalui kelompok ekonomi BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan).
- b. Rusia membentuk alternatif transaksi pembayaran internasional SPFS (*Sistema peredachi Finansovykh soobscheniy*) untuk menyaingi SWIFT (*Society For World-Wide Interbank Financial Telecommunications*).

## **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukanya penlitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui sanksi ekonomi yang diberikan Amerika Serikat dan sekutu terhadap Rusia atas operasi militer khusus Rusia ke Ukraina tahun 2022.
2. Mengetahui dampak dari sanksi ekonomi yang diberikan Amerika Serikat dan sekutu kepada Rusia.
3. Mengetahui Respon Rusia terhadap sanksi ekonomi yang diberikan oleh Amerika Serikat dan sekutu terhadap Rusia atas operasi militer khususnya ke Ukriana tahun 2022.
4. Mengetahui rendahnya ketetergantungan Rusia dengan negara pemberi sanksi dan alternatif kerjasama yang dimiliki Rusia dengan kelompok ekonomi BRICS.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif eksplanasi dalam membantu memahami dan menjelaskan topik yang sedang diteliti. Dalam penelitian eksplanasi sejatinya hal yang hendak dicapai adalah mengetahui peristiwa secara lebih spesifik dengan mencari tahu hubungan diantara dua variebel (Suyanto, 2005). Metode kualitatif adalah sebuah proses dalam menafsirkan suatu fenomena secara central yang mana proses penelitian diawali dari identifikasi masalah, penelusuran kepustakaan, menentukan maksud dan tujuan penelitian, pengumpulan data, penafsiran data serta pelaporan hasil penelitian (Raco, 2010).

Menurut (Sutikno & Hadisaputr, 2020) mendefinisikan metode kualitatif sebagai sebuah proses memahami perilaku manusia dan isu-isu yang sedang terjadi secara runtut dengan prioritas utama berdasar pada pemikiran dari penulis. Dapat disimpulkan metode kualitatif adalah sebuah proses dalam meneliti perilaku manusia

atau suatu fenomena yang hasilnya *pure* dari olah data pemikiran penulis dan dikerjakan secara sistematis serta kritis. Bentuk data yang dihasilkan tidak berupa angka dan hitungan tetapi berupa teks, gambar, cerita, foto, dan artifacts. Dalam mengumpulkan data penelitian dilakukan dengan teknik studi kepustakaan melalui perpustakaan non-digital maupun digital. Bentuk data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data skunder.

Penulis akan mencari data-data sesuai topik yang dibahas dalam hal ini dampak operasi militer khusus Rusia terhadap Ukraina, hubungan Rusia dengan negara pemberi sanksi, Hubungan Rusia dengan negara anggota kelompok kerjasama BRICS yang mana selanjutnya informasi terkait diperoleh melalui sumber-sumber seperti website resmi masing-masing negara yang berkaitan dengan topik yang diteliti, jurnal, buku, dan referensi lainnya. Kumpulan data selanjutnya dianalisis dengan cermat untuk memperoleh kesimpulan.

#### **G. Jangkauan Penelitian**

Untuk membatasi masalah yang akan diteliti, penulis membatasi jangka waktu kajian agar tidak bersimpangan dengan permasalahan yang diangkat, dimana peneliti hanya menggunakan sampel data yang terjadi pada tahun 2014-2022 karena pada tahun 2014 merupakan tahun ketika Rusia melakukan aneksasi pertama kali terhadap Ukraina di Krimea dan tahun 2022 operasi militer khusus Rusia ke Ukraina yang mana tindakan Rusia tersebut membuat Amerika Serikat dan sekutu memberikan sejumlah sanksi ekonomi kepada Rusia dalam upaya menghentikan tindakan operasi militer khususnya.

#### **H. Sistematika Penulisan**

**Bab I** Berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka teori, hipotesa, metode penelitian,

jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab II** Membahas konflik Rusia Ukraina, Sanksi internasional dan dampaknya, respon Rusia atas sanksi ekonomi, serta membahas terkait ketidaktergantungan Rusia kepada negara pemberi sanksi dan alternatif kerjasama Rusia dengan kelompok ekonomi BRICS serta metode pembayaran milik Rusia SPFS.

**Bab III** Berupa kesimpulan keseluruhan isi materi penelitian dan sekaligus berisi rangkuman dari pembahasan dari bab-bab sebelumnya.